E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Anggaran Pemerintah Pusat Turun pada 2023, Bisa Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi
Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022
Surat Kabar : Kontan
Halaman : -

Reporter: **Siti Masitoh** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp 2.230 triliun. Anggaran tersebut turun dari outlook 2022 yang sebesar Rp 2.370 triliun.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, efek dari rendahnya belanja bisa berdampak kepada output ekonomi, dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3% pada tahun 2023.

Meski begitu, Bhima menyebut untuk konsolidasi fiskal menuju defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3%, memang pemerintah harus mengorbankan beberapa pos anggaran.

“Pilihannya apakah subsidi energi dan dana kompensasi energi harus dipangkas, atau mengorbankan belanja rutin seperti belanja pegawai, dan belanja barang,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (19/8).

Ia memperkirakan, tahun depan pemerintah akan mengutamakan belanja yang sifatnya populis, yakni belanja subsidi energi dan belanja sosial, dan juga belanja yang berkaitan dengan politik mengingat akan mendekati pemilihan umum.

“Indikasinya anggaran infrastruktur akan di rem belanjanya, sudah mulai terlihat dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Juli 2022 yang realisasinya turun signifikan dibanding 2021,” jelasnya.

Adapun agar anggaran belanja yang menurun tidak menggerus pertumbuhan ekonomi, Bhima memberikan tiga saran perbaikan.

Pertama, tingkat serapan anggaran terutama di level Pemerintah Daerah (pemda) harus diperbaiki. Ini karena usulan defisit diperlebar diatas 3%. tetapi serapan pemda masih kurang optimal dan maka akan terjadi sisa anggaran lebih yang besar.

Kedua, belanja infrastruktur bisa lebih fokus ke penguatan produksi pangan dan energi. Misalnya daja akses jalan desa, irigasi dan mendorong pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Jadi langsung dirasakan dampak ke pengendalian inflasi.

Ketiga, membuka peluang renegosiasi beban bunga utang terhadap kreditur. Opsi DSSI (debt service suspenssion initiative) menurut Bhima bisa memasukkan Indonesia sebagai negara yang berhak meminta penangguhan pembayaran bunga utang.